

Penyuluhan Pertanian dan Ambiguitas Pembangunan

Denny Riezki Pratama¹, Brainy Brilliant²

¹Graduate School of Integrated Science for Global Society, Kyushu University
denny.riezkipratama@gmail.com

²Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran
brainy.brilliant1@gmail.com

Abstract

This research discusses agricultural assistance program as a practice in Indonesia's development discourse. This research aims to investigate the meaning and practice of agricultural assistance in daily local interactions that show the contradictions and ambiguities of Indonesia's development process. Agricultural assistance provides project opportunities and economic benefits. However, at the same time, it also shows the contradiction of meanings and conflict of interest, in the asymmetrical relations of development. Thus, a local development practice conducted with negotiations, resistances, contradictions, and could leads to manipulatives and corruption emerged.

Keywords: development, agriculture, ambiguity, meaning, practice

Abstrak

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan pertanian sebagai salah satu praktik dalam wacana pembangunan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri makna dan praktik penyuluhan pertanian dalam interaksi di tingkat lokal sehari-hari yang menunjukkan kontradiksi dan ambiguitas proses pembangunan di Indonesia. Kegiatan penyuluhan untuk petani menyediakan peluang proyek dan keuntungan ekonomi. Namun, di saat bersamaan kegiatan ini juga menunjukkan pertentangan makna dan tegangan konflik kepentingan, di dalam hubungan pembangunan yang asimetris; sehingga terjadi praktik pembangunan lokal yang penuh dengan negosiasi, resistensi, pertentangan, dan menjurus kepada praktik manipulatif dan koruptif.

Kata kunci: pembangunan, pertanian, ambiguitas, makna, praktik

Pendahuluan

Menutup pertemuan daring skala nasional antara menteri pertanian, petugas penyuluh, dan petani dari seluruh Indonesia,¹ seorang pejabat tinggi kementerian pertanian berpantun:

“Ke Pasar Minggu membeli duku.

Jangan lupa membeli jambu.

Pertanian Indonesia harus terus maju.

Petani, penyuluh harus bersatu.”

Di dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, pantun itu benar adanya. Di Indonesia, praktik penyuluhan pertanian lahir dari diskursus Revolusi Hijau. Revolusi Hijau

¹Kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) Volume 22 Tahun 2021.

menjadi paradigma pembangunan pertanian di Indonesia sejak dekade 1960. Diskursus modernisasi pertanian ini berdasar pada penggunaan benih silangan dan pupuk kimia sintetik (*seed-fertilizer revolution*). Budidaya pertanian juga didorong semakin intensif dengan mengencangkan mekanisasi alat pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan produktivitas panen per satuan lahan. Skema kredit pertanian pun disalurkan kepada usaha tani yang dinilai menguntungkan dan produktif.

Revolusi Hijau memicu proses perubahan sosial, ekonomi dan budaya, baik di pedesaan pertanian maupun di daerah pedalaman (Rinar-di *et al.*, 2019). Perubahan pertama yang terasa bagi masyarakat pedesaan adalah perubahan ekonomi masyarakat yang memengaruhi bidang lainnya (Saleh, 2020), termasuk mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya besar-besaran di masyarakat pertanian Asia Tenggara (Husken, 1998; Li, 2002; Scott, 2000).

Nugroho (2018) menjelaskan bahwa bentuk transformasi pertanian di Indonesia memberikan kesan bahwa pertanian yang dilakukan secara modern lebih baik dari yang dilakukan secara tradisional. Hal ini diperkuat dengan argumentasi pemerintah akan keberhasilan Revolusi Hijau. Pembangunan yang dipandang sebagai suatu jalan untuk menciptakan subordinasi dari desa ke negara baik secara struktural maupun kultural; yang awalnya dipahami sebagai agen perubahan sosial malah kemudian bertransformasi menjadi agen kapitalisme global (Wati, 2016). Di dalam Revolusi Hijau, penyuluh—orang yang melakukan penyuluhan—menjadi agen terdepan, sekaligus berada paling bawah dalam praktik modernisasi pertanian Indonesia.

Sesuai dengan tujuan besar Revolusi Hijau, tugas penyuluh adalah mentransformasi pertanian pangan di pedesaan melalui serangkaian aktivitas intervensi. Penyuluhan menekankan pada model pertanian ideal: intensif, modern, dan efisien. Namun, terdapat satu pemeco yang terkenal di antara penyuluh yaitu: “Kalau *gak* bisa dibina (petani), ya dibinasakan.”

Kata “dibina” dapat berarti ‘diberikan penyuluhan’, sehingga ungkapan itu menunjukkan

bahwa tidak semua orang (petani) dapat ‘disuluh/diintervensi/dibina’. Apabila ini yang dimaksud, berarti praktik pembinaan juga menyisihkan orang-orang yang tidak dapat atau tidak mau dibina. Berdasarkan ungkapan itu, para penyuluh mengingatkan bahwa pembinaan (penyuluhan) memiliki implikasi dan konsekuensi. Implikasi ini berkaitan dengan nilai dalam budaya penyuluhan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah (Chandra, 2013). Konsekuensinya, mereka yang masalahnya tidak dapat atau mau diselesaikan, dapat tersingkir (disingkirkan) dari arena penyuluhan.

Penyuluhan pertanian berperan penting dalam kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan ini hanya akan berjalan ketika ada kerja sama yang ‘sinergis’ antara penyuluh, petani, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Kerja sama ini harus dapat mengatasi perbedaan persepsi dan beragam pemaknaan yang kontradiktif dalam proses penyuluhan (Sundari *et al.*, 2015). Penyuluhan pertanian bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat menerima kebaruan teknologi pertanian untuk diadopsi. Adanya hal yang baru pada masyarakat tidak jarang menimbulkan kontradiksi dalam hubungan antara para pelaku.

Praktik kontradiktif dalam proses penyuluhan dapat ditemui pada Masyarakat Tengger. Mereka memaknai penyuluhan identik dengan pemberian bantuan (Romadi dan Warnaen, 2021). Masyarakat beranggapan orientasi penyuluhan sama dengan penyampaian informasi pengadaan bantuan. Mereka juga menganggap bahwa penyuluhan berarti pembentukan kelompok tani baru. Kelompok tani baru dibentuk untuk memperoleh bantuan pemerintah, tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antar warga. Ambiguitas makna dan praktik yang kontradiktif inilah yang kemudian melatarbelakangi penulisan artikel ini.

Artikel ini bermaksud menunjukkan bahwa wacana pembangunan pertanian mengandung

ambiguitas dan melahirkan kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksi tersebut berupa pertentangan makna, perbedaan nilai, dan konflik kepentingan antar aktor pembangunan yang hadir di tingkat lokal.

Kajian Pustaka

Pembangunan pertanian adalah upaya memadukan keunggulan komparatif dari sumber daya lokal dengan keunggulan kompetitif guna menyelaraskan dengan perkembangan dunia (Murdiyanto dan Kundarto, 2012). Tujuan dari adanya pembangunan pertanian yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, melalui sistem agribisnis yang memiliki daya saing, berkelanjutan, berbasis kerakyatan, dan desentralisasi (Mutiara *et al.*, 2013).

Di dalam proses pembangunan, petani dianggap memiliki keterkaitan dengan nilai tradisional mereka, dan kurang tanggap terhadap kebutuhan pasar (Situmeang, 2014). Di sisi lain, pembangunan menuntut para pelaku usaha di sektor pertanian untuk menyesuaikan permintaan pasar dengan meningkatkan nilai produk (Wahyurini dan Utomo, 2020). Penyuluh berfungsi untuk mengakomodir pengetahuan lokal masyarakat dengan pengetahuan modern untuk mengisi ruang penghubung antara petani dan proses pembangunan. Penyuluh berperan dalam membangun silang budaya dari praktik tradisional suatu komunitas menuju pandangan yang modern (Suryaalim *et al.*, 2018).

Wujud dari pembangunan ditentukan oleh proses interaksi para aktor. Hal ini sejalan dengan studi antropologis yang memperlakukan pembangunan sebagai wacana (*discourse*) (Escobar, 1995). Merujuk pemikiran Foucault mengenai 'wacana' (*discourse*), wacana pembangunan terhubung erat dengan kuasa. Foucault tidak memahami kuasa sebagai sesuatu yang melekat dalam individu atau kelompok, tetapi terdapat dalam kepentingan tertentu di dalam setiap praktik sosial. Konsep 'wacana' dari Foucault berguna untuk memahami dan menempatkan 'pembangunan' sebagai sebuah wacana yang padanya memiliki pengetahuan, praktik dan sekaligus relasi kuasa (Haryanto, 2017).

Kategori sosial dan nilai budaya lokal pun turut memengaruhi interaksi antarpelaku pembangunan. Terdapat aspek pemaknaan, praktik dan representasi subjek di dalam wacana pembangunan. Merujuk Pigg, Escobar menjelaskan,

“The development encounter, she adds, should be seen not so much as the clash of two cultural systems but as an intersection that creates situations in which people come to see each other in certain ways. In the process, social differences come to be represented in new ways, even if the prevailing forms (in terms of caste, class, and gender for instance) do not disappear: they are given-new meaning, and new forms of social positioning appear.” (Escobar, 1995)

Suryawan (2016) memperlihatkan gerakan sosial mama-mama Papua yang bermula dari pasar-pasar di Kota Manokwari. Pasar menjadi lokus interaksi keseharian yang mana pembangunan diperbincangkan dan ditantang. Proses kontestasi mikro serta interpretasi lokal ini, pada derajat tertentu, mampu mengubah arah dan bentuk pembangunan di tataran makro.

'Pembangunan' adalah wacana yang patut dikritisi terus menerus secara politis. Namun, kisah para pelakunya puitis, narasinya cair dan luwes penuh pertentangan makna. Pembangunan selalu berada dalam proses penafsiran dan kontestasi berulang-ulang berdasarkan pengalaman-pengalaman riil di lapangan. Melalui penafsiran ulang, kita dapat mempertanyakan kembali asumsi-asumsi pembangunan atas pertanian. Sebagai contoh, relasi manusia dengan tanah.

Penyuluhan pertanian, sebagai wujud dari wacana pembangunan, juga membangun ruang perjumpaan. Para pelaku yang terlibat dalam penyuluhan adalah aktor-aktor sosial. Mereka aktif memberikan penafsirannya masing-masing. Penafsiran, sering kali alternatif dari wacana arus utama, tetapi hadir dalam lingkup interaksi sehari-hari. Aktor sosial juga adalah subjek yang secara aktif memaknai praktik pembangunan. Aktor sosial ini bisa negara, warga masyarakat, dan perusahaan.

Welker memberi contoh tarik-ulur tafsir pada kegiatan pelatihan pertanian di NTT. Pelatihan itu didukung oleh perusahaan tambang, dilaksanakan oleh konsultan-aktivis, dan diikuti oleh petani yang memiliki catatan 'khusus' di mata perusahaan (Welker, 2014). Studi Efendi (2016) juga menjelaskan mengenai subjek yang patuh, lahir dari relasi kuasa melalui program pemberdayaan sebuah perusahaan di Pangandaran.

Fenomena proses penyuluhan sebagai wacana pembangunan erat kaitannya dengan ekonomi dan politik. Hubungan penyuluh dan petani adalah relasi sosial yang bersandar pada moralitas dan prinsip interaksi yang timbal balik (Maftuchin, 2016). Interaksi antara individu terjadi karena munculnya kebutuhan-kebutuhan dan adanya dorongan tertentu (Simmel dikutip oleh Mas'udi, 2015). Di dalam hal ini, dorongan tertentu berkaitan dengan praktik penyuluhan bagi petani.

Praktik penyuluhan pertanian tidak lepas dari adanya relasi kuasa sebagai bagian penting yang mengukuhkan praktik (Afandi, 2012). Foucault menggambarkan bahwa kekuasaan akan muncul dari adanya suatu relasi dan manusia berada dalam mekanisme kekuasaan tersebut. Di dalam praktik penyuluhan, hubungan antara pihak seperti pemerintah, penyuluh, dan petani telah menciptakan mekanisme kuasa bagi pihak yang terlibat. Permasalahan yang sering terjadi adalah para aktor tidak memahami perannya dalam mekanisme kuasa yang ada. Akibat dari ketidaksadaran ini, muncul berbagai tindakan dan mekanisme yang sewenang-wenang.

Sebagai subyek pembangunan, para aktor pada konteks lokal memiliki relasi kuasa yang asimetris. Beberapa contoh studi menunjukkan dampak pembangunan terhadap transformasi sosial, ekonomi dan budaya (Purwanti, 2018; Wijayanto *et al.*, 2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, baik petani maupun warga terkena dampak, berada pada posisi perifer terhadap pembangunan. Pembangunan menghasilkan perubahan dan kesenjangan, dan kemudian menghasilkan perubahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu kerentanan dan marjinalitas (Li, 2014; Tsing, 1998).

Artikel ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat. Subjek penelitian ini adalah petani, pemerintah, dan juga perusahaan, sebagai aktor sosial pelaku pembangunan. Subjek penelitian yang beragam menunjukkan bahwa wacana pembangunan pertanian di Indonesia pasca-Orde Baru tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor utama. Keterlibatan perusahaan dan gerakan petani juga turut menentukan pembangunan di tingkat lokal-mikro. Dinamika interaksi sehari-hari para aktor sosial pada ruang penyuluhan pertanian yang ditampilkan pada artikel ini dapat memberikan kebaruan pada kajian akademik terkait makna, praktik, relasi kuasa, dan pembangunan pertanian.

Metode

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri makna dan praktik penyuluhan pertanian. Hal ini dilakukan untuk memahami wacana pembangunan Indonesia. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana makna dan praktik penyuluhan terbentuk melalui interaksi penyuluh dan yang disuluh? Apa arti penyuluhan bagi mereka yang terlibat di dalamnya?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelusuri makna dan praktik penyuluhan pertanian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data sekunder diperoleh melalui berita dan laporan terkait dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian baik dari pemerintah maupun perusahaan, dan petani lokal. Semua keterangan tempat dan nama orang adalah *pseudonym*.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan Apa?

Pak Harsa dan Pak Yana adalah dua orang penyuluh pertanian dari pemerintah kabupaten di Kecamatan Aren. Mereka mulai menyuluh petani dari awal tahun 2000an, dari status mereka sebagai tenaga honorer hingga sekarang sebagai pejabat unit. Pak Harsa menjabat sebagai kepala unit, sedangkan Pak Yana pejabat bagian tata usaha.

Ketika ditanya mengenai tujuan penyuluhan, Pak Harsa menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses belajar-mengajar dan transfer teknologi, yang berlandaskan hukum.² Ada undang-undang khusus mengenai penyuluhan pertanian. Selain itu, metode dan teknis penyuluhan pertanian yang diatur dalam peraturan menteri pertanian.³ Pesan implisit dari jawaban tersebut bahwa penyuluhan adalah kewenangan formal, bagian dari teknik pembangunan pertanian.

Praktik penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak awal abad 20. Awal mulanya penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan hasil tani, yang tidak luput dari pemenuhan kepentingan penjajah dan juga masyarakat. Namun, adanya penyuluhan telah menumbuhkan inovasi dan hal ini sangat berguna dalam meningkatkan hasil pertanian sehingga praktik penyuluhan terus menerus dikembangkan (Febriyanti, 2020).

Formal, teknis, dan penuh wewenang. Tiga unsur itu melekat pada seragam dinas penyuluh pertanian. Pak Harsa dan Pak Yana hampir selalu berseragam dinas. Jarang sekali melihat penyuluh tidak menggunakan seragam dinas ketika sedang bekerja. Pak Ian, penyuluh dari sebuah perusahaan juga mengenakan seragam dinas di acara yang sama. Begitu juga perwakilan dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan terutama dari militer; semua yang mewakili institusi menggunakan baju seragam dinas. Seragam menyatakan kewenangan dan legitimasi. Penyuluh adalah sumber yang berwenang atas bidang pengetahuan pertanian.

Namun, interaksi pada saat penyuluhan berlangsung menunjukkan adanya relasi yang dinamis. Pernyataan atas kewenangan dan kekuasaan seorang penyuluh selalu berpeluang untuk dipertanyakan, bahkan digugat. Di dalam situasi itu, penyuluh juga sebetulnya secara bersamaan menempatkan dirinya pada posisi yang rentan.

Sebagai ilustrasi, di dalam suatu kegiatan penyuluhan sekitar tahun 2017, seorang peserta menyampaikan keluhan mengenai keter-

batasan modal. Ia mengajukan permohonan bantuan pestisida kepada Pak Yana; petani itu menanyakan apakah pemerintah dapat membantunya? Pak Yana, yang duduk di depan semua peserta, mencatat pertanyaan petani itu. Ia menjelaskan bahwa sebaiknya petani menggunakan uang kas kelompok tani - sebab proyek pemberian modal tani sama sekali tidak ada dalam agenda penyuluhannya. Setelah itu, Pak Yana melihat kepada wakil perusahaan yang hadir, sembari berkata,

“Mungkin dari perusahaan ada solusi? Bantuan pestisida mungkin? Sedikit saja...”

Perhatian khalayak seketika beralih ke perwakilan perusahaan. Apa yang dilakukan Pak Yana pada saat itu, bisa jadi salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan wewenang Pak Yana, dialihkan kepada pihak lain. Wakil perusahaan yang hadir saat itu juga sama-sama berada di depan forum, dan sama-sama menggunakan seragam. Pak Yana yang melakukan hal tersebut tidak hanya menjaga legitimasi penyuluh, tetapi juga dengan cerdas menjadi orang tengah yang memberikan solusi dari masalah melalui kewenangannya sebagai petugas penyuluhan yang memandu acara.

Penyuluhan dapat menjadi momen munculnya masalah yang tidak diduga. Namun, masalah juga berarti potensi untuk pengajuan proyek. Menurut Pak Harsa:

“Sebelum penyuluhan, kita menyiapkan materi yang mau disampaikan. Materi berdasarkan masalah. Setelah persiapan, kita lakukan pemaparan materi, dan setelah itu diskusi. Kita cari solusi bersama-sama. Apa masalahnya, dan bagaimana solusinya? Kalau teknis, kita jelaskan caranya. Kalau mengenai bantuan input, kita cari solusi. Bisa kita cari bantuan ke pemerintah atau pihak ketiga, seperti perusahaan.” (Wawancara dengan Harsa pada 05 Juli 2021)

Perusahaan juga menyediakan tenaga penyuluh

² Undang Undang RI, (2006) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

³ Peraturan Menteri Pertanian RI 2009 Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009

lapangan karena menyadari banyaknya bantuan yang perlu dikelola. Salah satu penyuluh dari perusahaan adalah Pak Ian. Karirnya dimulai dari tenaga lapangan untuk beberapa NGO di Kalimantan Timur. Pada tahun 2006, ia bekerja untuk perusahaan. Saat diwawancara, ia memilih tidak menyebut dirinya sebagai ‘penyuluh’;

“Ada perbedaan yang saya lakukan dengan penyuluh. Saya pendamping. ‘Pendamping’ mengubah paradigma petani, mengubah cara pandang, memberi motivasi. Kita memberikan motivasi ke petani, juga penjelasan kalau ada permohonan bantuan dari petani ke perusahaan.” (Wawancara dengan Ian pada 05 Juli 2021)

Apabila penyuluhan bermakna ‘bantuan’ dan ‘proyek’, maka kunjungan penyuluh ke kelompok tani, bermakna ‘perhatian’, dan peluang ‘bantuan’. Petani secara sadar memahami makna ini. Penyuluhan bernilai lebih dari sekedar ‘kegiatan penyuluhan’. Beberapa petani berpartisipasi sesuai perannya agar kepentingan semua pihak dapat terpenuhi. Hubungan antara petani dan penyuluh menggambarkan bekerjanya relasi kuasa pada program pembangunan. Sejalan dengan pandangan Foucault yang melihat kekuasaan muncul akibat adanya relasi, petani memaknai penyuluhan dan menilai penyuluh dalam konteks program pembangunan. Kesempatan menarik keuntungan dari sebuah proyek pertanian, mensyaratkan relasi sosial dan kuasa yang berlapis-lapis. Hal ini tercermin pada kisah yang dialami oleh Baba.

Baba adalah seorang pendatang di Kecamatan Aren pada tahun 2004. Pamannya adalah seorang mucikari, pemilik tempat hiburan malam, sekaligus tokoh yang disegani di desa tempat tinggal Baba sekarang. Sebelum menjadi petani, Baba bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang di Kecamatan Aren. Sekitar tahun 2015-2016, banyak karyawan yang diputus hubungan kerja, atau dipindahtugaskan ke daerah yang lebih jauh. Baba tidak mau pindah, sehingga memutuskan beralih profesi menjadi petani. Ia memulainya dengan menjadi operator alat berat untuk proyek nasional percontakan sawah di desanya.

Beberapa tahun kemudian, pamannya meninggal. Baba menggantikan posisinya sebagai ketua kelompok tani. Ia juga merangkap jabatan; sebagai ketua gabungan kelompok tani, ketua asosiasi tanaman komoditas se-kabupaten, sekaligus sebagai ketua RT. Kelompok tani Baba menjadi salah satu dari beberapa kelompok tani yang rutin mendapat bantuan di Kecamatan Aren. Di depan rumahnya, terdapat sebuah unit traktor merk ‘Kubota’, dan beberapa mesin pertanian. Sambil menunjuk, ia menjelaskan, “itu bantuan dari dewan [anggota legislatif tingkat kabupaten].” Bantuan, yang menurutnya, berpengaruh pada kemenangan anggota legislatif pada pemilihan umum yang lalu. Perhatian ‘pembangunan’ pada kelompok Baba memang jelas terlihat: sepanjang jalan menuju sawah kelompok Baba, terdapat empat papan proyek pertanian: dua dari pemerintah dan dua dari perusahaan.

Strategi mendapatkan bantuan dari pemerintah, dipelajarinya dari penyuluh. Ia mengisahkan:

“Yang hadir waktu rapat (penyuluhan): pembina, penyuluh, dan petani. Rapat waktu itu, tujuannya memecah kelompok untuk menyiasati dinas [pertanian], supaya bantuan dari dinas banyak masuk. Kalau (ada) tiga kelompok, bantuan akan lebih banyak daripada hanya satu kelompok.... Kalau sudah dipecah tiga, ada tiga bantuan dalam setahun.” (Wawancara dengan Baba pada 06 Juli 2021)

Cerita Baba memperlihatkan bagaimana petani membangun akses dan jaringan dengan aktif mengikuti kegiatan penyuluhan. Berdasarkan cerita Baba, relasi terbentuk karena adanya kebutuhan dan dorongan dari para aktor. Mereka yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan kemudian berbagi peran menyusun strategi untuk dapat merebut peluang bantuan/proyek pembangunan. Bagi petani seperti Baba, kepentingan tidak hanya urusan bantuan, tetapi lebih dari itu: relasi kuasa juga melahirkan otonomi pengawasan untuk diri sendiri.

Setelah proyek dicairkan dan bantuan diberikan, penyuluhan bergeser maknanya menjadi ajang pengawasan proyek. Penyuluh

menjadi pengawas proyek, sekaligus penilai kinerja kelompok tani. Baba berulang kali mengulang-ulang pentingnya melaporkan perkembangan produksi kelompok taninya kepada pihak perusahaan dan pemerintah. Baba menjelaskan bahwa laporan bukan hanya sarana pengawasan bagi pihak pemberi proyek, tetapi sekaligus bentuk pernyataan keberadaan sebuah kelompok tani. Pernyataan formal agar kelompok tersebut tetap mendapat 'perhatian' dari pelaksana proyek pembangunan.

Apabila terdapat proyek bermasalah atau ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, penyuluh biasanya meminta kepada ketua kelompok tani untuk mengundang semua anggota kelompoknya agar dapat segera dilakukan sesi 'penyuluhan'. Ketua kelompok tani seperti Baba memiliki peran penting dalam pengawasan. Penyuluhan jenis inilah yang dimaksud oleh Pak Ian, Pak Yana dan Pak Harsa sebagai 'penyuluhan karena masalah'. Salah satu proyek bermasalah yang ditemukan di lapangan adalah proyek bantuan benih padi pemerintah kepada kelompok Adnan.

Penyuluhan untuk Siapa?

Pak Adnan mengaku lahir pada tahun 1948, berasal dari Bojonegoro, dan pindah ke Kecamatan Aren pada tahun 1984. Pak Ian menceritakan, Pak Adnan pindah dari kampung untuk bekerja sebagai buruh kasar di Kecamatan Aren. Ia kemudian beralih menjadi pedagang. Pelanggannya adalah keluarga dan karyawan perusahaan kayu. Ini menjelaskan mengapa rumahnya dekat dengan lokasi pemukiman perusahaan kayu dan pabrik kayu lapis yang sekarang sudah mati suri.

Seperti dirinya, anggota kelompok tani Pak Adnan banyak yang berusia lanjut. Anggota kelompok tani tersebut berjumlah 32 orang ketika masih aktif pada empat tahun lalu. Namun, anggota yang tersisa saat ini hanya berjumlah enam orang. Banyak anggota yang sudah meninggal dunia, sementara anggota yang masih bisa bekerja, berganti mata pencaharian. Kelompok tani ini berhasil panen padi terakhir kali pada tahun 2019. Setelah itu, kelompoknya lebih sering gagal tanam, akibat

banjir luapan Sungai Aren yang mengelilingi hamparan sawah. Sekarang, ia hanya menanam palawija dan sayur mayur. Dua anggotanya bekerja sebagai kuli gali di proyek pembangunan irigasi di area sawahnya.

Pak Adnan bercerita, bahwa beberapa minggu lalu ada penyuluhan. Kelompoknya mendapat bantuan benih padi sebanyak satu ton dari pemerintah. Targetnya, benih itu ditanam di atas lahan seluas 40 hektar. Masalahnya, ia merasa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan ini. Akibatnya, bantuan benih itu hanya ditimbun di seberang sungai. Tidak ada yang memanfaatkannya.

Menurutnya, mendapat bantuan bukan tanpa konsekuensi:

“Jadi gini, Pak, aku *ndak* mengusulkan bantuan bibit! Sudah dua kali ini dapat bantuan, langsung dikirim. Pernah dulu, ngirimnya lambat, sudah ditanam baru datang bibit. Sekarang ya dapat bibit lagi. Sebetulnya aku *ndak* mengajukan, aku mintanya racun rumput. Kalau racun rumput lebih membantu, karena harganya mahal. Bibit kita bisa lah sendiri; terus ini dikirim bantuan bibit satu ton untuk empat puluh hektar. Tapi, *ndak* yakin mampu apa *ndak*.” (Wawancara dengan Adnan pada 07 Juli 2021)

Pak Adnan sempat mengusulkan agar bantuan itu dikembalikan ke pemerintah. Penanggung jawab proyek itu justru menjelaskan, apabila bantuan dikembalikan, kemungkinan kelompok tani Pak Adnan tidak akan pernah dapat bantuan lagi. Kelompoknya akan dianggap tidak ada. Penjelasan ini membuat Pak Adnan ragu. Menerima bantuan berarti harus menanam benih, yang secara objektif tidak akan mampu dilakukannya. Di sisi lain, apabila kelompok taninya tidak menerima bantuan, maka akan mendapatkan penilaian buruk yang berakibat tidak ada bantuan lagi di masa depan. Pada saat penyuluhan, Pak Yana menganjurkan agar Pak Adnan menerima benih bantuan ini, dan ditanam 'semampunya'. Apabila ada kelompok tani lain yang memerlukan benih, ia dapat membaginya. Namun, di dalam lapo-

ran resmi, pemanfaatan benih akan ditulis sebagai penggunaan kelompok Pak Adnan.

Suatu hari, ketika Pak Ian berkunjung, Pak Adnan menyampaikan masalah mengenai bantuan dari perusahaan tempat Pak Ian bekerja. Percakapan diawali dengan masalah penguasaan lahan sawah di kelompoknya Pak Adnan yang sebagian besar dimiliki oleh orang luar desa. Para pemilik lahan memilih mendiamkan sawahnya karena jera lahannya terus-menerus terkena banjir. Akibatnya, buruh tani di kelompoknya beralih kerja serabutan di luar lahan pertanian dan tidak ada lagi yang menanam padi sawah. Pak Ian, sebagai penyuluh dari perusahaan, menyarankan Pak Adnan melebur kelompoknya dengan kelompok tani tetangga yang masih aktif. Hal ini bertujuan agar status kelompok tani Pak Adnan tetap diakui dan ia tetap dapat mengajukan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Pak Ian dan Pak Adnan berdebat sengit mengenai program bantuan yang diterima oleh kelompok Pak Adnan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok tani lain yang mengambil bantuan kapur pertanian milik kelompok Pak Adnan. Kapur tersebut memang tidak digunakan sepenuhnya oleh kelompok Pak Adnan, akan tetapi kelompok tani yang mengambil barang bantuan tidak memberikan biaya ganti rugi, padahal Pak Adnan sudah mengeluarkan modal untuk bongkar muat barang.

Melihat kondisi kelompok tani Pak Adnan yang semakin berkurang jumlahnya, Pak Ian malah terus mengulang-ulang sarannya agar Pak Adnan bersedia melebur dengan kelompok tani lain. Namun, seperti kembali ke titik awal, saran ini tidak menjawab masalah struktural yang dihadapi kelompok tani Pak Adnan terkait penguasaan lahan sawah dan serapan tenaga kerja pertanian yang semakin berkurang.

Di dalam banyak kasus, penyuluhan memang erat kaitannya dengan proyek pemberian bantuan pertanian. Bagi penyuluh pemerintah, penyuluhan adalah kewenangan yang diberikan negara atas pertanian. Hal ini berbeda dengan penyuluh perusahaan. Pak Ian mengartikan perannya sebagai pendamping—menjembatani petani dengan perusahaan; tanpa kewenangan berarti.

Penyuluhan juga berarti proyek, baik bagi penyuluh (pemerintah maupun perusahaan), maupun petani. Sebuah kegiatan penyuluhan dapat bermakna peluang, berorientasi, dan bagian dari pengelolaan proyek pertanian. Penyuluh berperan sebagai teknisi sekaligus pengawas, sedangkan petani penerima proyek adalah kolaborator di lapangan. Bagi petani seperti Baba, penyuluhan menunjukkan perhatian, juga peluang untuk mendapat proyek bantuan. Namun sebaliknya, bagi petani seperti Pak Adnan, penyuluhan dapat bermakna kesempatan melakukan negosiasi, bahkan perlawanan kecil, dengan pengelola proyek demi mendapat perhatian yang berkelanjutan.

Batas-Batas Penyuluhan

Menurut Pak Harsa, Pak Yana dan Pak Ian, penyuluhan pertanian dimulai dengan identifikasi masalah teknis yang dihadapi petani di lapangan. Berdasarkan masalah itu, mereka menyusun materi penyuluhan yang akan dipaparkan di depan peserta penyuluhan. Biasanya mereka akan membuka diskusi tanya jawab setelah sesi materi selesai. Selama berdiskusi, tampak lembar daftar hadir diedarkan untuk ditandatangani peserta.

Daftar hadir dapat terlihat sepele. Namun, daftar hadir memiliki makna lain, terutama bagi penyuluh. Pak Yana menjelaskan:

“Saat penyuluhan, diskusi saya batasi hanya pada materi teknis saja. Ada juga yang bertanya di luar materi penyuluhan. Makanya, saya minta dibuatkan daftar hadir yang berbeda untuk pertanyaan di luar materi. Daftar hadir dengan tanggal kosong, nanti saya isi sendiri. Absen [presensi/daftar hadir] itu punya kredit poin untuk saya. Saya isikan tanggal yang berbeda untuk tiap materi yang berbeda. Petani kan juga lupa kapan pernah tanya materi ini. Jadi, sekali jalan dapat tiga absen. Tapi yang penting petani paham.” (Wawancara dengan Yana pada 05 Juli 2021)

Pak Yana menyampaikan, setahun ia harus mengumpulkan 25 poin. Pengumpulan poin berpengaruh pada kenaikan golongan, jabatan,

dan remunerasi. Daftar hadir, foto kegiatan, sertifikat pelatihan, laporan, kaji terap demo plot (demplot), dan publikasi penyuluhan memiliki kredit poinnya masing-masing. Besarnya kredit poin dan realisasi proyek adalah penarik utama bagi penyuluh menjalankan penyuluhan model demplot. Hal ini terbukti dengan papan informasi mengenai demplot yang masih berdiri walau pelaksanaan demplot sudah lewat satu tahun. Namun kenyataannya, petani penggarap saat ini menerapkan teknik budidaya yang berbeda dari teknik yang dijadikan demplot.⁴

Pak Ian menjelaskan apa yang sebenarnya berlangsung saat pembuatan demplot. Pertama, penyuluhan hanya diberikan kepada petani yang bersedia lahannya dijadikan demplot; biasanya petani pemilik lahan. Namun saat di lapangan, Pak Ian tidak melihat banyak petani terlibat. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Kementerian Pertanian RI, 2009), demonstrasi bertujuan untuk pengembangan kerukunan dengan masyarakat.

Setiap proyek demplot 'dipegang' oleh dua orang penyuluh. Papan informasi demplot berisi keterangan metode yang sedang diujicobakan dan informasi nama penyuluh yang bertanggung jawab dipasang untuk pemantauan dan bukti evaluasi. Namun, yang ia sering jumpai justru penyuluhlah yang turun menggarap demplot, sedangkan petani hanya melihat dan menonton penyuluh mencangkul lahan mereka. Bagaimana panggung, demplot menampilkan permainan peran dalam interaksi sosial yang sarat makna. Walaupun demikian, beberapa petani penerima proyek tetap merasa bahwa demplot bermanfaat.

Baba merasa penyuluhan demplot membantu ia dalam banyak hal: teknik memilih benih, cara tanam bibit, dan hasil *sampling* panen yang jauh lebih banyak. Menurutnya, wajar apabila demplot diberikan untuk petani yang produktif. Hanya petani yang punya tanaman saja yang seharusnya dibina. Di dalam hal ini,

dibina berarti penyuluh turun langsung ke lapangan sambil memberikan contoh praktik. Hal ini bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dari perusahaan.

“Makanya, mereka pernah ngomong orang perusahaan datang cuma moto-moto aja.” (Wawancara dengan Baba pada 06 Juli 2021)

Orang perusahaan yang dimaksud Baba ialah Pak Ian. Model penyuluhan Pak Ian sedikit berbeda dengan penyuluh pemerintah. Dia memulai kegiatannya dengan menanyakan apa yang ditanam petani, dan berapa hasil panennya. Setelah itu, ia lanjut menanyakan hasil penjualan petani, sebelum diteruskan diskusi mengenai masalah-masalah budidaya dan solusinya.

Perbedaan model penyuluhan yang dilakukan oleh Pak Ian dengan penyuluh pemerintah bisa jadi karena perbedaan pemahaman mengenai definisi 'masalah'. Menurut Pak Ian, masalah petani adalah 'pasar'. Hal ini selalu diangkat di setiap kesempatan penyuluhan. Pak Ian mengingatkan petani yang ia dampingi agar menyesuaikan usaha tani mereka dengan permintaan pasar agar petani cerdas membaca pasar; komoditas apa yang lebih laku di pasaran; berbagi strategi pemasaran hasil panen yang jitu, fluktuasi harga komoditas, dan seterusnya. Di beberapa kesempatan, ia berbagi saran kepada petani mengenai cara mengelola uang hasil panen, cara berinvestasi, dan mengelola aset. Melalui materi penyuluhan itu, ia sebetulnya memotivasi petani agar lebih terkonsolidasi ke dalam sistem pasar. Pendek kata, tujuan penyuluhan dan pendampingan Pak Ian adalah untuk mencetak wirausaha tani. Praktik penyuluhan ini sama seperti halnya proses pemberdayaan petani perempuan di Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta, melalui pengadaan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas bisnis, mengubah petani sebagai produsen komoditi kecil (Suratna *et al.*, 2020).

Sebagai karyawan perusahaan, Pak Ian diberi

⁴ Demplot, demo plot, atau demonstrasi plot adalah salah satu metode penyuluhan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 52 Tahun 2009, demplot adalah peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan di lahan usaha taninya. Tujuannya untuk “untuk mempercepat penyebarluasan teknologi unggulan dengan cara mendekatkan, memperkenalkan dan memperagakan dengan sebuah aplikasi langsung di kalangan petani” (Kementerian Pertanian Badan Litbang dan Pertanian, 2014) (<https://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/1698/> diakses 13 November 2021).

tanggung jawab untuk memastikan agar program bantuan bermanfaat bagi petani. Ia sering mendatangi petani dampungannya untuk mendata hasil panen dan omset penjualan. Data utama dalam laporan Pak Ian adalah hasil panen dan omset. Selain itu, ia juga mengumpulkan data tentang perkembangan budidaya, dan kendala-kendala teknis seperti hama atau penyakit. Namun, tidak ada laporan mengenai masalah pola penguasaan lahan atau mata pencaharian rumah tangga petani.

Laporan tidak hanya dibuat oleh penyuluh, tetapi juga disusun oleh petani. Laporan kelompok tani berfungsi untuk menunjukkan status kelompok tani aktif. Menurut Baba, kelompok taninya bahkan disertifikasi dan disahkan, dengan syarat utama kelengkapan laporan. Legalitas sebuah kelompok tani bernilai penting, karena penyuluhan selalu menyasar petani dalam satuan kelompok tani formal. Penyuluhan jarang dilakukan untuk petani perorangan.

Selain itu, kelompok tani diikat oleh komitmen uang kas. Uang kas digunakan untuk kebutuhan perawatan aset milik kelompok, menggelar acara panen, dan tentunya, menjadi tuan rumah penyuluhan rutin. Apabila tidak ada uang kas, mereka tidak bisa menyuguhkan sesuatu bagi tamu acara.

Bagi kelompok tani, uang kas menentukan kemampuannya menyelenggarakan acara. Semakin besar acara yang digelar, semakin berbobot pula tamu undangannya. Pada acara seremonial yang besar, seperti panen raya, penyuluhan tidak lagi diisi oleh penyuluh lapangan, tetapi oleh pejabat dan kepala daerah. Pak Adnan masih mengingat momen penyuluhan dan diskusi bersama bupati saat ia dan kelompoknya menyelenggarakan acara panen raya empat tahun lalu. Bagi kelompok tani dan juga penyuluh, mampu menggelar acara berarti mampu menjaga jaringan, dan itu memperbesar peluang mendapat proyek pembangunan. Motif ini berlaku dua arah seperti cerita di bawah ini.

Pada sebuah pertemuan, hadir kepala desa bersama petani dan penyuluh. Selama ini, desa itu identik dengan hasil lautnya. Pak Ian mengatakan kepada khalayak pertemuan, saat-

nya kepala desa mendukung potensi pertanian. Ia dan salah seorang penyuluh berencana mengundang bupati ke desa, agar dapat memamerkan potensi dan hasil pertanian kelompok tani desa tersebut. Menurutnya, hal ini adalah cara agar dapat meningkatkan nama baik penyuluh, sekaligus agar ada perhatian dari pemerintah kabupaten.

Berdasarkan cerita di atas, membina kelompok tani sama dengan menyusun portofolio proyek pertanian. Contoh lainnya, adalah kisah Pak Yana yang meleburkan dua kelompok tani-peternak yaitu Kelompok Pinang dan Rejeki demi mengikuti ajang penghargaan tingkat provinsi. Pak Yana yakin bahwa kedua kelompok tersebut dapat berkolaborasi untuk mendapatkan penilaian dewan juri. Pak Yana kemudian mengajukan proposal bantuan atas nama Kelompok Rejeki ke perusahaan.

Serangkaian penyuluhan dilaksanakan secara simultan agar secara administratif dan teknis peleburan dua kelompok itu terlihat alamiah dan meyakinkan. Hasilnya, Kelompok Rejeki mendapat penghargaan pertama tingkat provinsi, dan pada tahun berikutnya berhasil mendapat penghargaan pertama tingkat nasional. Hal ini membanggakan karena belum pernah ada kelompok peternak unggas lokal, selain dari Jawa dan Sulawesi, yang memenangkan penghargaan tingkat nasional. Pak Yana pun berhasil mendapatkan predikat penyuluh terbaik di tingkat kabupaten. Namun, dua tahun setelah ajang itu, hanya Kelompok Pinang saja yang masih lanjut beternak unggas lokal, hingga kemudian berhenti akibat kesulitan pengadaan bibit.

Bentuk praktik penyuluhan juga dipengaruhi oleh idealisme dan moral penyuluh terhadap 'produktivitas petani'. Menurut Pak Harsa, penyuluhan bertujuan untuk mengubah kebiasaan lama petani sehingga mereka dapat lebih efisien dengan cara budidaya yang modern dan produktif. Penyuluhan dilakukan dengan berfokus pada tiga sasaran perubahan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan (PSK). Menurut Pak Harsa, mengubah PSK petani, berarti menyuluh dengan memberikan contoh dan tauladan.

“Apa yang didengar, apa yang dilihat,

dan apa yang dilakukan akan lebih mengena (pada diri petani).” (Wawancara dengan Pak Harsa pada 05 Juli 2021)

Kisah penyuluhan Pak Harsa dan Pak Yana di Kampung Berdaya dapat menggambarkan sampai batas apa kehendak memperbaiki, menggerakkan dan membentuk hadir dalam praktik penyuluhan. Pak Harsa mula-mula membentuk tim pemberdayaan *ad-hoc* yang beranggotakan hampir semua penyuluh se-Kecamatan Aren. Di Kampung Berdaya, mereka menempati rumah kosong yang digunakan sebagai pos penyuluhan. Di pos tersebut, para penyuluh mendapatkan jadwal ‘piket’ bergiliran.

Beberapa warga kampung yang kebanyakan adalah peladang berpindah dan perambah hutan datang ke pos pemberdayaan untuk mendapat arahan kerja. Para penyuluh di pos mengarahkan mereka untuk bekerja gotong royong membuka petak sawah. Selain itu, para peladang berpindah dan perambah hutan juga datang untuk pembagian bantuan berupa bibit, pupuk atau alat kerja. Bantuan berasal dari pemerintah dan perusahaan, berupa dana, benih, dan bibit.

Pak Harsa dan Pak Yana benar-benar ‘turun’ ke lapangan. Mereka ikut membersihkan lahan sawah bersama warga. Mereka ikut serta mengaplikasikan racun rumput di ladang pekarangan yang ada di kampung itu. Pak Yana memotong rumput menggunakan mesin di halaman sekeliling pos dan merencanakan untuk menanam pepaya ‘California’ di lahan pekarangan milik desa yang tak terawat. Selain itu, mereka juga memanfaatkan halaman pos untuk lokasi penyemaian atau pembibitan.

Beberapa kali warga tampak datang dan berinteraksi dengan penyuluh. Namun, warga yang datang hanya orang-orang yang sama. Situasi ini menimbulkan pernyataan: apakah tauladan memotong rumput di halaman, dan menyempot ilalang di ladang berstatus lahan desa dapat mengubah kebiasaan dari orang-orang yang kesehariannya berladang berpindah dan perambah hutan?

Hingga kini, lahan sawah basah yang ada di kampung Berdaya belum juga ditanami padi.

Bibit tanaman palawija hasil bantuan, hanya berhasil dipanen oleh segelintir kepala keluarga. Pak Harsa dan Pak Yana menjelaskan mengapa hasil penyuluhan mereka tidak berhasil. Mereka mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran dan kepedulian warga lokal terhadap penyuluhan yang sudah diberikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penyuluhan pertanian memiliki berbagai bentuk. Sebagai praktik keseharian, wujudnya ditentukan oleh interaksi antara pelaku-pelaku yang berkepentingan. Penyuluhan adalah praktik pengelolaan proyek pembangunan dan perpanjangan dari ideologi pasar, yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen administratif, yaitu laporan, daftar hadir, dan proposal. Bentuknya pun dapat berwujud pertemuan, pendampingan, pelatihan, bangunan monumen fisik seperti demplot, sampai idealisasi model pertanian dengan menjadikan diri penyuluh sendiri sebagai contoh tauladan.

Ragam bentuk praktik penyuluhan juga ditentukan oleh motif sosial-budaya para pelaku. Contohnya seperti praktik memberi suguhan dan perayaan kepada pihak yang lebih berkuasa. Pada masyarakat Pandalungan, Probolinggo, suguhan diartikan sebagai suatu wujud rasa syukur atas kehadiran tamu (Tjahyadi *et al.*, 2020). Praktik suguhan dan perayaan dalam suatu penyuluhan telah memunculkan ruang untuk bernegosiasi, mengakumulasi akses, dan mengkonsolidasi jaringan di dalam model pembangunan yang birokratis, sekaligus infiltrasi logika pasar dalam kehidupan sehari-hari petani melalui penyuluhan. Tidak jarang pula penyuluhan menjadi sarana untuk menyampaikan protes dan kritik. Penyuluhan menjadi ruang kontestasi terhadap paradigma pembangunan yang tidak relevan dengan masalah sehari-hari petani, juga relasi timpang secara politis antara petani, negara dan pasar.

Ambiguitas Pembangunan

Para aktor yang terlibat di dalam kegiatan penyuluhan memiliki latar sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Perbedaan ini menyebabkan adanya kepentingan yang berbeda-beda. Bagi penyuluh, memberikan penyuluhan berarti mengubah petani agar para petani dapat

hidup dengan baik dan berkelanjutan dengan diberikan edukasi secara non formal (Ardita *et al.*, 2017). Petani adalah sasaran perbaikan terus menerus; dari tradisional ke modern, dari subsisten menuju pasar, dari informal ke formal. Penyuluhan memberikan akses bagi para petani agar dapat mengakses jejaring yang mampu meningkatkan produktivitas (Indraningsih dan Septanti, 2020). Upaya ini erat hubungannya dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada proyek dan pasar. Pada cerita-cerita yang disajikan sebelumnya, tema proyek dan pasar selalu hadir silih bergantian.

Bagi petani, mengikuti penyuluhan pertanian berarti bagian dari merawat akses dan menjaga jaringan. Kemampuan itu meningkatkan peluang petani menjangkau sumber daya pembangunan, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Materi penyuluhan mungkin saja tidak terlalu berguna bagi petani, tetapi pertemuan dengan penyuluh, pemerintah maupun perusahaan, bernilai strategis. Penyuluhan yang rutin dan berkelanjutan penting bagi kelompok tani, karena menentukan keberlangsungan manfaat proyek pertanian bagi kelompok tersebut.

Berdasarkan penelusuran terhadap penyuluhan pertanian, terdapat beberapa temuan mengenai ambiguitas makna dan praktik pembangunan Indonesia. *Pertama*, praktik penyuluhan pertanian adalah bentuk dari penetrasi kuasa wacana pembangunan nasional, namun juga pasar bebas (perusahaan, rezim pangan global, dsb) dalam waktu bersamaan ke tingkat yang paling kecil. *Kedua*, dengan menyingkap bagaimana sebetulnya praktik penyuluhan pertanian dilakukan, menunjukkan bahwa wacana pembangunan pertanian di level makro, diwujudkan secara pragmatis ke dalam bentuk-bentuk teknikalisis proyek di level lokal dan mikro.

Li dikutip Suryawan (2016) menyatakan bahwa teknikalisis merupakan suatu upaya merumuskan permasalahan dan penyelesaian masalah tanpa harus menyentuh hal mendasar seperti kekuasaan. Teknikalisis di lapangan mewujud dalam bentuk 'pembinaan'. Bagi penyuluh dan petani, mengelola proyek juga berarti mengelola risiko. Semua pihak yang

terlibat mungkin akan mengalami pertentangan internal, kecurangan di tengah jalan, ketidakpastian faktor alam, gagal teknologi, dan sebagainya.

Ketiga, petani yang mengikuti penyuluhan, secara simbolik menunjukkan mereka bersedia untuk dibina, dan karena itu berhak berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan di era kompetisi global, berpartisipasi dalam program penyuluhan merupakan realitas lapangan yang harus petani ikuti (Faisal, 2017). Petani yang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan memiliki kesempatan untuk mendapatkan proyek pemerintah atau bantuan dari perusahaan. Selain itu, petani yang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan juga berarti mendapatkan peran sebagai aktor pembangunan.

Penyuluhan memberikan kesempatan petani untuk melakukan negosiasi terhadap model pembangunan yang ditawarkan. Hal ini tercermin dalam kisah bantuan benih Pak Adnan, atau cerita petani yang sengaja tak mengaplikasikan cara bertani sesuai kaidah demplot. Berdasarkan posisi petani yang berada di pinggiran, rentan dan merasa tidak relevan, penyuluhan memberikan kesempatan mereka untuk melakukan gugatan terhadap dominasi pembangunan; unjuk rasa kecil.

Konflik, pertentangan nilai, dan pembangunan, tercermin dalam penelitian Scott (2000) di Sedaka, atau perlawanan petani tembakau di Temanggung (Sobary, 2016), dan konflik sosial para buruh petani di Bondowoso (Hamyana dan Ugik, 2017). Pertentangan makna dan konflik yang terjadi merupakan wujud dari marjinalisasi petani.

Marjinalitas dan kerentanan petani tampak pada panggung penyuluhan. Petani kecil memaknai penyuluhan dari posisi marginal mereka, seperti dukun Meratus memaknai negara dan identitas mereka dalam upacara ritualnya (Tsing, 1998). Penyuluhan pertanian serupa dengan ritual praktik upacara. Di situ berlaku pertukaran nilai, operasionalisasi jaringan sosial, negosiasi terhadap relasi kuasa dan proses pemaknaan terus-menerus.

Proses ini dapat menghasilkan peluang-pelu-

ang konsolidasi kepentingan oleh para aktor pembangunan. Namun, bagi mereka yang rentan dan miskin sumber daya, proses ini berpotensi semakin meminggirkan petani dari proses pembangunan; bisa jadi ini adalah proses ‘pembinaan’ yang sesungguhnya.

Simpulan

Penyuluhan pertanian memiliki makna dan praktik yang beragam. *Pertama*, praktik penyuluhan pertanian berarti perwujudan dari kewenangan formal; pernyataan negara atas rakyat melalui diskursus pembangunan. *Kedua*, penyuluhan pertanian juga berarti akses masuk terhadap proyek bantuan pemerintah, dan peluang mendapatkan keuntungan bagi pihak pengelola proyek. Penyuluh dan beberapa petani kunci memfasilitasi kelompok tani untuk dapat mengakses proyek melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluh dan petani sama-sama mendapat keuntungan, walau dalam bentuk dan nilai yang berbeda. *Ketiga*, penyuluhan pertanian juga merupakan praktik pengawasan dan pemantauan proyek. *Keempat*, melalui penyuluhan, proyek dapat direkayasa yang dapat menjurus pada praktik manipulatif, bahkan koruptif. *Kelima*, penyuluhan menyediakan panggung konflik sekaligus sarana resolusi bagi para aktor yang bertikai. Konflik terjadi karena persilangan kepentingan terbuka antaraktor.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa wujud pembangunan di tingkat mikro sering kali berbeda dengan diskursus pembangunan di tingkat makro. Paradigma mengenai kemajuan pertanian di tingkat kebijakan melalui budidaya intensif, efisiensi produksi dan berorientasi pasar, pada kenyataannya diwujudkan sebagai kegiatan berorientasi proyek di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, semua pihak sebaiknya menyadari bahwa gagasan serta praktik pembangunan tidaklah bebas nilai. Gagasan mengenai pertanian yang efisien, modern dan produktif, serta praktik penyuluhan adalah wujud dari relasi kuasa yang asimetris antara pelaksana pembangunan, dengan objek pembangunan. Selain itu, baik pelaku pembangunan maupun ‘objek’ pembangunan terikat pada struktur sosial-budaya

masing-masing yang sangat spesifik. Beberapa tokoh di dalam artikel ini memiliki sejarah yang berbeda dan berasal dari kelas ekonomi serta latar budaya yang beragam. Semuanya memengaruhi cara para pihak memaknai program pembangunan (pertanian).

Para pelaku pembangunan perlu mempertimbangkan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya ini sehingga kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi pada penelitian ini (pemberian benih yang tidak sesuai jadwal tanam dan bantuan yang salah sasaran) dapat dihindari. Sebuah program idealnya menyesuaikan seluruhnya pada kondisi riil petani, musim dan kebutuhan yang nyata ditemukan di lapangan. Mengubah tata kelola proyek yang berorientasi pada penerima manfaat memerlukan perubahan struktural, perbaikan kebijakan, aksi yang berpihak dan waktu pelaksanaan. Namun, justru di sinilah peran penting petugas penyuluhan lapangan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian Indonesia. Perubahan bisa saja dimulai dari bawah apabila seperti pantun di awal artikel ini, penyuluh dan petani bersatu.

Referensi

- Afandi., A. K. (2012). Konsep kekuasaan Michel Foucault. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131–149. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>
- Ardita, A., DWP, S., dan Widjanarko, D. (2017). Kinerja Penyuluh Pertanian Menurut Persepsi Petani: Studi Kasus di Kabupaten Landak. *Journal of Vocational and Career Education*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.15642/vce.v2i1.10908>
- Chandra, L. A. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Administrasi Negara*, 1(3), 885–889.
- Efendi, R. (2016). Program Pemberdayaan Sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility Studi Kasus Pemberdayaan Penderes di Pangandaran. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10163>
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

- Faisal, H. (2017). Respon Petani Terhadap Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 17–38.
- Febriyanti, R. (2020). Penyuluhan Sosial Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat. Dalam *Lekkas*. Lekkas.
- Hamyana, dan Ugik, R. (2017). Pembangunan dan Konflik Sosial di Masyarakat Desa. *Agriekonomika Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.vi2.1959>
- Haryanto, V. (2017). Subjek Petani dalam Wacana Pembangunan di Manggarai. *Journal of Governance*, 2(1). <https://dx.doi.org/10.15642/10.31506/jog.v2i1.2122>
- Husken, F. (1998). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa, 1830-1980*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indraningsih, K. S., dan Septanti, K. S. (2020). Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Pemberdayaan Petani Pada Era Pandemi Covid-19. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementan 2020*, 613–633.
- Kementerian Pertanian Badan Litbang, dan Pertanian. (2014). *Demo Plot Untuk Perbaikan Mutu Benih*. <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/1698/>
- Kementerian Pertanian RI. (2009). *Metode Penyuluhan Pertanian*. 52.
- Li, T. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Translated by S. N. Kartikasari and Sumitro. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Li, T. M. (2014). *Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Translated by S. N. Kartikasari and Sumitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maftuchin, A. S. (2016). Tuan Tanah dan Lurah : Relasi Politik Lokal Patron-Client di Desa Sukorejo Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang dalam Kurun Waktu 2007-2013. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2), 138–149. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.9983>
- Mas'udi. (2015). Akar-Akar Teori Konflik : Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1832>
- Murdiyanto, E., dan Kundarto, M. (2012). *Membangun Kemitraan Agribisnis*.
- Mutiara, F., Koestiono, D., dan Muhaimin, A. W. (2013). Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Subsidi Input Output Terhadap Pengembangan Komoditas Kedelai (*Glycine Max*) di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo dan Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan). *Habitat*, 24(2), 92–102.
- Nugroho, W. (2018). Konstruksi sosial revolusi hijau di era orde baru. *SOCA: Jurnal Sosial-Ekonomi dan Agribisnis*, 12(1), 54–62. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04>
- Rinardi, H., Masruroh, N. N., Maulany, N. N., dan Rochwulaningsih, Y. (2019). Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 125–136.
- Romadi, U., dan Warnaen, A. (2021). *Sistem Penyuluhan Pertanian "Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger. 1*.
- Saleh, A. (2020). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan Pasca Revolusi Hijau. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 71–93. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.10>
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Situmeang, I. V. (2014). Beragam Isu Menyangkut Kebijakan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 11(2), 126–137.
- Sobary, M. (2016). *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sundari, Yusra, A. H., dan Nurliza. (2015). Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani di Kabupaten Pontianak. *Journal Social Economic of Agriculture*, 4(12), 10–14. <https://dx.doi.org/10.15642/10.26418/j.sea.v4i1.10129>
- Suratna, S., Soeprapto, A., Susanta, S., dan Nugroho, S. P. (2020). Empowerment of Women Farmers Group through Processing of Agricultural Products in Hargomulyo Village, Kokap, Kulon Progo Yogyakarta. *LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Conference Series Proceeding on Political and Social Science (PSS)*, 1(1), 40–50. <https://doi.org/10.31098/pss.v1i1.179>
- Suryaalim, A., Sarwoprasodjo, S., dan Permatasari, R. B. (2018). Hibridisasi Ritus Tradisional

- Sebagai Media Komunikasi Pembangunan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. *Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 30–42. <https://doi.org/10.46937/16201825119>
- Suryawan, I. N. (2016). Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 2(1), 146-158. https://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.185
- Suryawan, I. N. (2016). “Tak Cukup Bagi Kami untuk Meratap, Kami harus Berjuang”: Kemandirian Mama-Mama dalam Dinamika Pemekaran Daerah di Tanah Papua. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2), 150–162. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10060>
- Purwanti, T. (2018). Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(2), 95–104. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.21696>
- Tjahyadi, I., Wafa, H., dan Zamroni, M. (2020). Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pandalungan: Kasus Upacara Taropan di Probolinggo. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.1542/suluk.2020.2.1.52-62>
- Tsing, A. L. (1998). *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan; Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang RI. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006*, 1–39.
- Wahyurini, E., dan Utomo, H. S. (2020). Creating Agricultural Product Innovations and Business Development: A Case in Farmer Women Group. *LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Conference Series Proceeding on Political and Social Science (PSS)*, 1(1), 77-82. <https://doi.org/10.31098/pss.v1i1.182>
- Wati, Y. (2016). Marjinalisasi Pedesaan Akibat Relasi Kuasa Lokal dan Supralokal. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(5), 83–96.
- Welker, M. (2014). *Enacting the Corporation - an American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia*. University of California Press.
- Wijayanto, V., Suwartapradja, O., dan Hermawati, R. (2017). Perubahan Mata Pencarian dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 2(2), 66–77. <https://doi.org/10.24198/umbara.v2i2.20446>